



RENJA SKPD 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312
E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA OPD 2020 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

RENJA OPD 2020 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA OPD 2020 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA OPD 2020.

Sekian dan terima kasih.

Lamongan, 24 Juli 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 1919670524 199302 1 004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Landasan Hukum.....	2
	3. Maksud dan Tujuan	3
	4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	5
	1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	5
	1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
	2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	9
	3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
	4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
	1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
	2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	19
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	21
BAB V	PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah sebagai rencana tahunan, sehingga berdampak kepada penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- 1) RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 2) RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, kondisi umum yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun Kabupaten;
- 3) Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijaka, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
- 4) Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

- 5) RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

2. LANDASAN HUKUM

Sehubungan dengan keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, maka Rencana Kerja (RENJA) berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan.
- 2) RENSTRA OPD Menjadi Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.
- 3) Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pelaksana evaluasi kerja dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan untuk

1. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi, atau melebihi target kinerja program / kegiatan.
- b. Implikasi yang ditimbulkan terhadap terget capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- c. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPDM selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

Pada Tahun 2018 total anggaran DPDM Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 9.475.866.000,00** dengan rincian sebesar Belanja Langsung sebesar **Rp 6.638.586.000,00** dan Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.837.280.000,00** yang dialokasikan untuk 9 Program 39 Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi belanja langsung sebesar **Rp. 6.546.140.703** (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah) dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,61%.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2019, kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian target kinerja tahunan dalam Rencana Strategis DPDM periode 2016 – 2021, dikarenakan Rencana Kerja 2019 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan pencapaian Renstra DPDM Kabupaten Lamongan sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel Berikut ;

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimplkan sebagai berikut

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di dukung oleh 9 Program, didalamnya terdiri dari 4 program pendukung dan 5 program utama yang mana targetnya telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Target kinerja yang telah tercapai, meliputi ;
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - i. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPDM memiliki 39 kegiatan yang terdiri dari 10 kegiatan pendukung dan 29 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah ;

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yang selaras dengan pencapaian target masing – masing kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu penting yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya penggunaan data base desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan

pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

4. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

5. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa melalui Dinas Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM mandiri perdesaan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga – lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana

bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaannya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

7. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

8. Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Dalam membangun *good governance* bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Renja tahun 2020 yang disusun, memuat sasaran yang ingin dicapai

berikut indikator sasaran serta rencana capaiannya yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan.

Melalui dokumen Renja ini, akan diketahui pula keterkaitan antara kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan yang diusulkan dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lamongan

Adapun Reviuw terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana Tabel 2.4. sebagaimana terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah mengakomodasi dan mengkoordinasikan usulan pemangku kepentingan pada sektor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam suatu rencana program dan kegiatan, yang nantinya akan dilaksanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongn Tahun 2019.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan Arah Kebijakan :
 - a. Mempercepat pengurangan kemiskinan;
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
 - e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar

2. Prioritas Nasional 2 : Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, dengan Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan konektivitas;
 - b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika;
 - c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa;
 - d. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sector unggulan hulu-hilir perikanan

3. Prioritas Nasional 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif dengan Arah Kebijakan :
 - a. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
 - c. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
 - d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

- e. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah
4. Prioritas Nasional 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air, dengan Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan produksi energy primer;
 - b. Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran energy;
 - c. Meningkatkan aksesibilitas energy;
 - d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energy dan listrik;
 - e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
 - f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
 - g. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
 - h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus muinutrisi;
 - i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
 - j. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya;
 - k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
 - l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS;
 - m. Meningkatkan kesadaran terkait sumber day air
5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, dengan Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber;
 - b. Menjamin kesuksesan Pemilu;
 - c. Memperkuat pertahanan wilayah nasional;
 - d. Meningkatkan kepastian hokum dan Reformasi Birokrasi;
 - e. Memperkuat efektivitas diplomasi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan

dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder’s* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 3) **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
- 4) **Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, **”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”** ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung kondisi

stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan 6 (enam) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2016 – 2016, yaitu :

1) Tujuan

Mewujudkan Desa Mandiri

Indikator : Jumlah Desa Mandiri

2) Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator : Prosentase Desa maju

Target tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”** dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik”**.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up, dan top down. Melalui pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial yang dilakuakn dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD)

4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
(terlampir)

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Perangkat Daerah
(terlampir)

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagaimana table rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan.

RENJA DPMD Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMD Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung

jawab untuk :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2020, selanjutnya Renja Tahun 2020 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, 24 Juli 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670524 199302 1 004

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

KODE REKENING	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1	02	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		% Unit Kerja Internal yang	80%	80%	100%	80%	80%	100%		
1	02	07	01	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
1	02	07	01	02	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Jumlah Barang Pakai Habis Perkantoran	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
1	02	07	01	03	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	865 Perjalanan Dinas	173 Perjalanan Dinas	173 Perjalanan Dinas	173 Perjalanan Dinas	100%	173 Perjalanan Dinas	173 Perjalanan Dinas	100%
1	02	07	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		% sarana Prasarana aparatur	80%	80%	100%	80%	80%	100%		
1	02	07	02	03	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Gedung Kantor	35 Notebook , 10 Printer, 15 Komputer Dekstop, 45 AC,20 Lemari Besi	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	100%	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	100%
1	02	07	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5 unit taman, 5 pengecatan gedung, 5 perbaikan berkala gedung, 10 toilet'	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	100%	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	100%

KODE REKENING	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 07 02 05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	100%	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	100%
1 02 07 02 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	100%	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	100%
1 02 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin								
1 02 07 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya								
1 02 07 05	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya	Prosentase peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 02 07 05 01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%
1 02 07 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	% Jumlah dokumen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1 02 07 06 01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Berkala	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	15 Buku Laporan	3 Buku Laporan	3 Buku Laporan	3 Buku Laporan	100%	3 Buku Laporan	3 Buku Laporan	100%
1 02 07 06 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	50 Buku Laporan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	100%	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	100%
1 02 07 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	% Peningkatan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	42,86%	40,00%	40,00%
1 02 07 15 03	Fasilitasi dan Pembinaan Dana Desa	Jumlah Desa yang dibina	462 Desa	462 Desa	462 Desa	462 Desa	100%	462 Desa	462 Desa	100%

KODE REKENING	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 07 15 09	Fasilitasi Plestarisasi Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program Rumah Sehat	Jumlah Rumah yang dilesterisasi	1500rumah	750 rumah	1000 rumah	1000 rumah	100%	1500 rumah	1250 rumah	100%
1 02 07 15 13	Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Jumlah Desa yang difasilitasi	462 Desa	462 Desa	462 Desa	462 Desa	100%	462 Desa	462 Desa	100%
1 02 07 15 14	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta pelatihan	400 peserta	80 peserta	80 peserta	80 peserta	100%	100 peserta	80 peserta	100%
1 02 07 15 15	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan dan Usaha Masyarakat Desa	400 peserta	80 peserta	80 peserta	80 peserta	100%	100 peserta	80 peserta	100%
1 02 07 17 20	Fasilitasi Peningkatan Tehnologi Tepat Guna	Jumlah Peserta pelatihan	1250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	100%	350 orang	250 orang	100%
1 02 07 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	% Jumlah Perkembangan BUMDes Aktif	64,94%	64,94%	64,94%	64,94%	100%	75,76%	64,94%	100%
1 02 07 16 08	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Jumlah BUMDes yang dikembangkan	40 BUMDes	40 BUMDes	40 BUMDes	40 BUMDes	100%	60 BUMDes	40 BUMDes	100%
1 02 07 16 09	Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang dibina	40 Pasar Desa	40 Pasar Desa	40 Pasar Desa	40 Pasar Desa	100%	60 Pasar Desa	40 Pasar Desa	100%
1 02 07 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Nilai Keswadayaan Masyarakat	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100%	14,71%	11,11%	100%
1 02 07 17 03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Prosentase peningkatan Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	16,67%	25,00%	100%
1 02 07 17 04	Pembinaan Dan Lomba Potensi/Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba	108 Desa	108 Desa	108 Desa	108 Desa	100%	162 Desa	108 Desa	100%
1 02 07 17 08	Pembinaan Lembaga Hippam	Jumlah HIPAM yang dibina	108 Kelompok	108 Kelompok	108 Kelompok	108 Kelompok	100%	162 Kelompok	108 Kelompok	100%
1 02 07 17 13	Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbangdes yang dimonitoring	108 Desa	108 Desa	108 Desa	108 Desa	100%	162 Desa	108 Desa	100%
1 02 07 17 15	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tni	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1 02 07 17 16	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	108 Desa	108 Desa	108 Desa	108 Desa	100%	162 Desa	108 Desa	100%
1 02 07 17 17	Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Swadaya Masyarakat	Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	474 desa / kelurahan	474 desa / kelurahan	474 desa / kelurahan	474 desa / kelurahan	100%	474 desa / kelurahan	474 desa / kelurahan	100%
1 02 07 17 18	Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi Dan Budaya Masyarakat	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	5 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	100%	4 Kelompok	4 Kelompok	100%

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

No	INDIKATOR	SPM / STANDART NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
a	Prosentase PKK aktif		Meningkatnya peran kelembagaan PKK	86,06%	91,43%	96,81%	99,20%	100,00%	86,06%	91,43%	96,81%	99,20%	100,00%	Terpenuhi
b	Prosentase Posyandu aktif		Menibgkatnya Posyandu aktif	80,34%	82,30%	84,31%	86,38%	88,51%	80,34%	82,30%	84,31%	86,38%	88,51%	Terpenuhi

Tabel 2.4.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

Program dan Kegiatan No		Rancangan Awal RKPD Tahun 2020				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	80%	Rp 746.400.000		% Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	80%	Rp 967.320.914
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Dinas PMD	Jumlah Jasa Layanan	6 Kegiatan	Rp 496.400.000	Dinas PMD	Jumlah Jasa Layanan	6 Kegiatan	Rp 605.087.933
2	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Dinas PMD	Jumlah Barang Pakai Habis Perkantoran	6 Kegiatan	Rp 190.000.000	Dinas PMD	Jumlah Barang Pakai Habis Perkantoran	6 Kegiatan	Rp 281.707.481
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas PMD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	173 Perjalanan Dinas	Rp 60.000.000	Dinas PMD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	173 Perjalanan Dinas	Rp 80.525.500
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Sarana Prasarana	80%	Rp 540.000.000			80%	Rp 662.039.400
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	Dinas PMD	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Gedung Kantor	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	Rp 140.000.000	Dinas PMD	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Gedung Kantor	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	Rp 225.471.400
2	Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	Rp 180.000.000	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	Rp 124.448.500
3	Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	Rp 125.000.000	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	Rp 173.030.000

Program dan Kegiatan No		Rancangan Awal RKPD Tahun 2020				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	Rp 95.000.000	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor , 5 Mobil Operasional , Service, Bahan Bakar Minyak	Rp 139.089.500
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Prosentase Peningkatan Disiplin aparatur	100%	Rp -		Prosentase Peningkatan Disiplin aparatur	100%	Rp -
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas PMD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Rp -	Dinas PMD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp 11.500.000		Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp 15.000.000
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Dinas PMD	Jumlah Pendidikan dan	2 Orang	Rp 11.500.000	Dinas PMD	Jumlah Pendidikan dan	2 Orang	Rp 15.000.000
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Lporan Keuangan yang tepat Waktu	80%	Rp 72.000.000		Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Lporan Keuangan yang tepat Waktu	80%	Rp 90.000.000
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala	Dinas PMD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	3 Buku Laporan	Rp 30.000.000	Dinas PMD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	3 Buku Laporan	Rp 45.000.000
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 Buku Laporan	Rp 42.000.000	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 Buku Laporan	Rp 45.000.000
F	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		% Peningkatan Kelompok Masyarakat yang di berdayakan	42,86%	Rp 1.020.500.000			42,86%	Rp 987.742.000
1	Fasilitasi dan Pembinaan Dana Desa	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang dibina	462 Desa	Rp 475.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang dibina	462 Desa	Rp 322.102.000
3	Fasilitasi Plestarisasi Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program Rumah Sehat	Kab. Lamongan	Jumlah Rumah yang diplesterisasi	1250 rumah	Rp 250.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Rumah yang diplesterisasi	1250 rumah	Rp 366.025.000

Program dan Kegiatan No		Rancangan Awal RKPD Tahun 2020				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Fasilitasi Bagi Hasil Pajak atau Retribusi	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang difasilitasi	462 Desa	Rp 70.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang difasilitasi	462 Desa	Rp 87.846.000
5	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Lamongan	Jumlah peserta pelatihan	100 peserta	Rp 75.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah peserta pelatihan	100 peserta	Rp 80.000.000
6	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan dan Usaha Masyarakat Desa	100 peserta	Rp 75.500.000	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan dan Usaha Masyarakat Desa	100 peserta	Rp 58.564.000
7	Fasilitasi Peningkatan Tehnologi Tepat Guna	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta pelatihan	300 orang	Rp 75.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta pelatihan	300 orang	Rp 73.205.000
G	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		% Jumlah Perkembangan BUMDes Aktif	75,76%	Rp 440.000.000			75,76%	Rp 819.896.000
1	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Kab. Lamongan	Jumlah BUMDes yang dikembangkan	50 BUMDes	Rp 275.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah BUMDes yang dikembangkan	50 BUMDes	Rp 585.640.000
2	Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pasar Desa	Kab. Lamongan	Jumlah Pasar Desa yang dibina	50 Pasar Desa	Rp 165.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Pasar Desa yang dibina	50 Pasar Desa	Rp 234.256.000
H	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Prosentase Nilai Keswadayaan Masyarakat	13,33%	Rp 1.325.000.000			13,33%	Rp 1.387.357.000
1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Kab. Lamongan	Prosentase Peningkatan Bantuan Pembiayaan Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana)	20,00%	Rp 210.000.000	Kab. Lamongan	Prosentase Peningkatan Bantuan Pembiayaan Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana)	20,00%	Rp 146.410.000
2	Pembinaan Dan Lomba Potensi atau Tingkat Perkembangan Desa	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang mengikuti lomba	135 Desa	Rp 220.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang mengikuti lomba	135 Desa	Rp 260.000.000
3	Pembinaan Lembaga Hippam	Kab. Lamongan	Jumlah HIPAM yang dibina	135 Kelompok	Rp 135.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah HIPAM yang dibina	135 Kelompok	Rp 197.653.500
4	Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kab. Lamongan	Jumlah Musrenbangdes yang dimonitoring	135 Desa	Rp 110.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Musrenbangdes yang dimonitoring	135 Desa	Rp 146.410.000
5	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd)	Kab. Lamongan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 250.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 292.820.000

Program dan Kegiatan No		Rancangan Awal RKPD Tahun 2020				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lamongan	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	135 Desa	Rp 150.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	135 Desa	Rp 146.410.000
7	Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Swadaya Masyarakat	Kab. Lamongan	Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	474 desa / kelurahan	Rp 55.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	474 desa / kelurahan	Rp 43.923.000
8	Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi Dan Budaya Masyarakat	Kab. Lamongan	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang	4 Kelompok	Rp 120.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang	4 Kelompok	Rp 43.923.000
9	Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra)	Kab. Lamongan	Jumlah keluarga miskin yang terbantu	1750 orang	Rp 75.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah keluarga miskin yang terbantu	1750 orang	Rp 109.807.500
I	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		% Desa Berkembang	49,57%	Rp 680.000.000			49,57%	Rp 490.473.500
1	Labsite Model Pengembangan Desa dan Kelurahan	Kab. Lamongan			Rp -		Jumlah Desa yang di kembangkan		
2	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang di monev	27 kecamatan/104 desa	Rp 175.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang di monev	27 kecamatan/104 desa	Rp 73.205.000
3	Fasilitasi Indeks Desa Membangun (IDM)	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang di hitung	462 Desa	Rp 100.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Desa yang di hitung	462 Desa	Rp 117.128.000
4	Penyusunan Profil Desa	Kab. Lamongan	Jumlah Penyusun Profil Desa	462 desa	Rp 100.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Penyusun Profil Desa	462 desa	Rp 109.807.500
5	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan desa (SISKEUDES) APBDes	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan APBDes	1010 orang	Rp 110.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan APBDes	1010 orang	Rp 73.205.000
6	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kab. Lamongan	Jumlah LPM baik	135 LPM	Rp 195.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah LPM baik	135 LPM	Rp 117.128.000
J	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan		% Jumlah Kelompok Perempuan aktif	75,50%	Rp 1.614.500.000			75,50%	Rp 2.115.895.000
2	Pembinaan Kader PKK	Kab. Lamongan	Jumlah PKK yang dibina	502 lembaga	Rp 710.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah PKK yang dibina	502 lembaga	Rp 1.098.075.000
3	Fasilitasi Pembinaan Taman Posyandu	Kab. Lamongan	Jumlah Taman Posyandu yang dibina	462 Desa	Rp 780.000.000	Kab. Lamongan	Jumlah Taman Posyandu yang dibina	462 Desa	Rp 725.000.000
4	Revitalisasi Posyandu	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta						
6	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Up2K)	Kab. Lamongan	Jumlah Peserta Pelatihan	500 orang		Kab. Lamongan	Jumlah Peserta Pelatihan	500 orang	Rp 146.410.000

Program dan Kegiatan		Rancangan Awal RKPD Tahun 2020				Hasil Analisa Kebutuhan			
No		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Fasilitasi Perguliran simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Lamongan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 124.500.000	Kab. Lamongan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 146.410.000
Jumlah					6.449.900.000	Jumlah			7.535.723.814

Tabel 3.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting (*)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	02 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		% Unit Kerja Internal yang	80%	Rp 746.400.000		80%	Rp 967.320.914
1	02 07 01 01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Dinas PMD	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran	6 Kegiatan	Rp 496.400.000	APBD Kab.	6 Kegiatan	Rp 605.087.933
1	02 07 01 02	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Dinas PMD	Jumlah Barang Pakai Habis Perkantoran	6 Kegiatan	Rp 190.000.000	APBD Kab.	6 Kegiatan	Rp 281.707.481
1	02 07 01 03	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas PMD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	173 Perjalanan Dinas	Rp 60.000.000	APBD Kab.	173 Perjalanan Dinas	Rp 80.525.500
1	02 07 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		% sarana Prasarana aparatur	80%	Rp 540.000.000		80%	Rp 662.039.400
1	02 07 02 03	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Gedung Kantor	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	Rp 140.000.000	APBD Kab.	7 Notebook , 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC,4 Lemari Besi	Rp 225.471.400
1	02 07 02 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	Rp 180.000.000	APBD Kab.	1 unit taman, 1 pengecatan gedung, 1 perbaikan berkala gedung, 5 toilet'	Rp 124.448.500
1	02 07 02 05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	Rp 125.000.000	APBD Kab.	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	Rp 173.030.000

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting (*)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 07 02 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / Operasional	Dinas PMD	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service, Bahan Bakar Minyak	Rp 95.000.000	APBD Kab.		1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service, Bahan Bakar Minyak	Rp 139.089.500
1 02 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin		100%	Rp -				Rp -
1 02 07 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas PMD	52 buah	Rp -	APBD Kab.			Rp -
1 02 07 05	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur	Prosentase peningkatan		100%	Rp 11.500.000	APBD Kab.		100%	Rp 15.000.000
1 02 07 05 01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal		2 Orang	Rp 11.500.000	APBD Kab.		2 Orang	Rp 15.000.000
1 02 07 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	% Jumlah dokumen		80%	Rp 72.000.000	APBD Kab.		80%	Rp 90.000.000
1 02 07 06 01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Berkala	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dinas PMD	3 Buku Laporan	Rp 30.000.000	APBD Kab.		3 Buku Laporan	Rp 45.000.000
1 02 07 06 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dinas PMD	10 Buku Laporan	Rp 42.000.000	APBD Kab.		10 Buku Laporan	Rp 45.000.000
1 02 07 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	% Peningkatan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan		42,86%	Rp 1.020.500.000			42,86%	Rp 987.742.000
1 02 07 15 03	Fasilitasi dan Pembinaan Dana Desa	Jumlah Desa yang dibina	Kab. Lamongan	462 Desa	Rp 475.000.000	APBD Kab.		462 Desa	Rp 322.102.000
1 02 07 15 09	Fasilitasi Plestarisasi Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program Rumah Sehat	Jumlah Rumah yang diplesterisasi	Kab. Lamongan	1250 rumah	Rp 250.000.000	APBD Kab.		1500 rumah	Rp 366.025.000
1 02 07 15 13	Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Lamongan	462 Desa	Rp 70.000.000	APBD Kab.		462 Desa	Rp 87.846.000
1 02 07 15 14	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta pelatihan	Kab. Lamongan	100 peserta	Rp 75.000.000	APBD Kab.		100 peserta	Rp 80.000.000
1 02 07 15 15	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan dan Usaha Masyarakat Desa	Kab. Lamongan	100 peserta	Rp 75.500.000	APBD Kab.		100 peserta	Rp 58.564.000
1 02 07 17 20	Fasilitasi Peningkatan Tehnologi Tepat Guna	Jumlah Peserta pelatihan	Kab. Lamongan	300 orang	Rp 75.000.000	APBD Kab.		350 orang	Rp 73.205.000
1 02 07 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	% Jumlah Perkembangan BUMDes Aktif		75,76%	Rp 440.000.000			75,76%	Rp 819.896.000

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting (*)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 07 16 08	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Jumlah BUMDes yang dikembangkan	Kab. Lamongan	50 BUMDes	Rp 275.000.000	APBD Kab.		60 BUMDes	Rp 585.640.000
1 02 07 16 09	Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang dibina	Kab. Lamongan	50 Pasar Desa	Rp 165.000.000	APBD Kab.		60 Pasar Desa	Rp 234.256.000
1 02 07 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Nilai Keswadayaan Masyarakat		13,33%	Rp 1.325.000.000			14,71%	Rp 1.387.357.000
1 02 07 17 03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Prosentase peningkatan Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa	Kab. Lamongan	20,00%	Rp 210.000.000	APBD Kab.		16,67%	Rp 146.410.000
1 02 07 17 04	Pembinaan Dan Lomba Potensi/Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba	Kab. Lamongan	135 Desa	Rp 220.000.000	APBD Kab.		162 Desa	Rp 260.000.000
1 02 07 17 08	Pembinaan Lembaga Hippam	Jumlah HIPAM yang dibina	Kab. Lamongan	135 Kelompok	Rp 135.000.000	APBD Kab.		162 Kelompok	Rp 197.653.500
1 02 07 17 13	Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbangdes yang dimonitoring	Kab. Lamongan	135 Desa	Rp 110.000.000	APBD Kab.		162 Desa	Rp 146.410.000
1 02 07 17 15	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tni Manunggal Membangun	Jumlah Kegiatan	Kab. Lamongan	1 Kegiatan	Rp 250.000.000	APBD Kab.		1 Kegiatan	Rp 292.820.000
1 02 07 17 16	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	Kab. Lamongan	135 Desa	Rp 150.000.000	APBD Kab.		162 Desa	Rp 146.410.000
1 02 07 17 17	Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Swadaya Masyarakat	Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	Kab. Lamongan	474 desa / kelurahan	Rp 55.000.000	APBD Kab.		474 desa / kelurahan	Rp 43.923.000
1 02 07 17 18	Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi Dan Budaya Masyarakat	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	Kab. Lamongan	4 Kelompok	Rp 120.000.000	APBD Kab.		4 Kelompok	Rp 43.923.000
1 02 07 17 19	Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra)	Jumlah keluarga miskin yang terbantu	Kab. Lamongan	1750 orang	Rp 75.000.000	APBD Kab.		2500 orang	Rp 109.807.500
1 02 07 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	% desa berkembang		49,57%	Rp 680.000.000			50,22%	Rp 490.473.500
1 02 07 18 17	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Jumlah Desa yang di movev	Kab. Lamongan	27 kecamatan/104	Rp 175.000.000	APBD Kab.		27 kecamatan/104	Rp 73.205.000
1 02 07 18 30	Fasilitasi Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Desa yang di hitung	Kab. Lamongan	462 Desa	Rp 100.000.000	APBD Kab.		462 Desa	Rp 117.128.000
1 02 07 18 31	Penyusunan Profil Desa	Jumlah Penyusun Profil Desa	Kab. Lamongan	462 desa	Rp 100.000.000	APBD Kab.		462 desa	Rp 109.807.500
1 02 07 18 32	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan desa (SISKEUDES) APBDes	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan APBDes	Kab. Lamongan	1010 orang	Rp 110.000.000	APBD Kab.		1512 orang	Rp 73.205.000
1 02 07 15 33	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah LPM baik	Kab. Lamongan	135 LPM	Rp 195.000.000	APBD Kab.		162 LPM	Rp 117.128.000
1 02 07 19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	% Jumlah Kelompok Perempuan aktif		78,50%	Rp 1.614.500.000	APBD Kab.		81,75%	Rp 2.115.895.000
1 02 07 19 02	Pembinaan Kader PKK	Jumlah PKK yang dibina	Kab. Lamongan	502 lembaga	Rp 710.000.000	APBD Kab.		502 lembaga	Rp 1.098.075.000
1 02 07 19 03	Fasilitasi Pembinaan Taman Posyandu	Jumlah Taman Posyandu yang dibina	Kab. Lamongan	462 Desa	Rp 780.000.000	APBD Kab.		462 Desa	Rp 725.000.000
1 02 07 19 09	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Up2K)	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Lamongan	500 orang	Rp -	APBD Kab.		620 orang	Rp 146.410.000

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting (*)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja (Kuantitatif)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 07 19 10	Fasilitasi Perguliran simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Berbasis	Jumlah Kegiatan	Kab. Lamongan	1 Kegiatan	Rp 124.500.000	APBD Kab.		1 Kegiatan	Rp 146.410.000
Jumlah					6.449.900.000			Jumlah	7.535.723.814

Tabel 4.2.
Prioritas Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Tahun 2019

No	Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	KODE REKENING Program / Kegiatan				Program / Kegiatan	Pagu Anggaran				
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,19%	Kabupaten Lamongan	1	02	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	691.686.000		
				1	02	07	01	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Rp	441.686.000		
				1	02	07	01	02	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Rp	190.000.000		
				1	02	07	01	03	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp	60.000.000		
				1	02	07	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp	440.000.000		
				1	02	07	02	03	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp	150.000.000		
				1	02	07	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	70.000.000		
				1	02	07	02	05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	125.000.000		
				1	02	07	02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	95.000.000		
				1	02	07	05		Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur	Rp	18.800.000		
				1	02	07	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Rp	18.800.000		
				1	02	07	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp	25.000.000		
				1	02	07	06	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Berkala	Rp	5.000.000		
				1	02	07	06	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	Rp	20.000.000		
				1	02	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	995.000.000		
				1	02	07	15	03	Fasilitasi dan Pembinaan Dana Desa	Rp	475.000.000		
				1	02	07	15	09	Fasilitasi Plestarisasi Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program Rumah Sehat	Rp	250.000.000		
				1	02	07	15	13	Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp	70.000.000		
				1	02	07	15	14	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Rp	75.000.000		
				1	02	07	15	15	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa	Rp	50.000.000		
				1	02	07	17	20	Fasilitasi Peningkatan Tehnologi Tepat Guna	Rp	75.000.000		
				1	02	07	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	550.000.000		
				1	02	07	16	08	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Rp	385.000.000		
				1	02	07	16	09	Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pasar Desa	Rp	165.000.000		
				1	02	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	1.090.000.000		
				1	02	07	17	03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Rp	210.000.000		
				1	02	07	17	04	Pembinaan Dan Lomba Potensi/Tingkat Perkembangan Desa	Rp	125.000.000		
				1	02	07	17	08	Pembinaan Lembaga Hppam	Rp	135.000.000		
				1	02	07	17	13	Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Rp	110.000.000		
				1	02	07	17	15	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tni Manunggal Membangun Desa (Tnmmd)	Rp	150.000.000		
				1	02	07	17	16	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Rp	150.000.000		
				1	02	07	17	17	Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Swadaya Masyarakat	Rp	35.000.000		
				1	02	07	17	18	Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi Dan Budaya Masyarakat	Rp	100.000.000		
				1	02	07	17	19	Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra)	Rp	75.000.000		
1	02	07	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	780.000.000						
1	02	07	18	16	Labsite Model Pengembangan Desa dan Kelurahan	Rp	95.000.000						
1	02	07	18	17	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Rp	175.000.000						
1	02	07	18	30	Fasilitasi Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp	100.000.000						
1	02	07	18	31	Penyusunan Profil Desa	Rp	100.000.000						
1	02	07	18	32	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan desa (SISKEUDES) APBDes	Rp	110.000.000						

No	Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	KODE REKENING Program / Kegiatan					Program / Kegiatan	Pagu Anggaran		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	5,19%	Kabupaten	1	02	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	691.686.000	
				1	02	07	15	33	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Rp	200.000.000	
				1	02	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Rp	1.600.000.000	
				1	02	07	19	02	Pembinaan Kader PKK	Rp	600.000.000	
				1	02	07	19	03	Fasilitasi Pembinaan Taman Posyandu	Rp	680.000.000	
				1	02	07	19	06	Revitalisasi Posyandu	Rp	100.000.000	
				1	02	07	19	09	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Up2K)	Rp	110.000.000	
				1	02	07	19	10	Fasilitasi Perguliran simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Rp	110.000.000	
Jumlah										6.190.486.000		